

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Papua adalah salah satu pulau konflik tersubur dan terlama di Indonesia. Konflik di Papua sudah berlangsung sejak 1963 hingga kini. Karena itu, Papua masih diberi label sebagai daerah konflik, bahkan juga tercatat sebagai daerah konflik bernuansa kekerasan terlama di Indonesia. Konflik ini terjadi antara Papua dan Jakarta. Percikan konflik tersebut telah mengusung dampak buruk terhadap semua orang baik pihak Papua maupun Jakarta. Akibat dari konflik ini banyak orang telah menjadi korban.

Konflik vertikal ini tentunya memiliki dasar persoalan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berhasil merumuskan empat permasalahan mendasar, yakni marginalisasi penduduk asli Papua, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kekerasan militer, dan proses integrasi Papua ke Indonesia yang dianggap bermasalah. Akar persoalan ini akhirnya membangkitkan amarah dalam hati masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. Kemarahan rakyat Papua sering terungkap lewat tindakan demonstrasi.

Mengakhiri konflik vertikal dan merespons tuntutan dari masyarakat Papua, pemerintah pusat merumuskan berbagai kebijakan dan pendekatan. Sejak bermulanya konflik, pemerintah pusat berusaha menanggapi dengan pendekatan keamanan. Namun pendekatan tersebut tidak membawa hasil yang memuaskan. Justru dengan menerapkan pendekatan ini, korban jiwa makin banyak di tanah Papua. Dan kasus pelanggaran HAM di Papua makin meningkat. Karena, pendekatan ini dianggap kurang efektif dan justru menambah pelanggaran HAM, maka pemerintah pusat melakukan pendekatan pembangunan. Pemerintah pusat sangat optimis dengan kebijakan dan pendekatan yang digagas dan diterapkan di Papua untuk memberhentikan lajunya konflik vertikal di Papua. Perlu diakui bahwa setidaknya pendekatan pembangunan ini telah mengubah wajah Papua sebagian. Terlepas dari keberhasilan, tentunya pendekatan pembangunan masih

mengisahkan problem. Hal ini terlihat dari minimnya berbagai fasilitas umum, tenaga guru yang sangat terbatas dan jalan-jalan di pelosok-pelosok belum dibangun. Hal ini telah menimbulkan kemacetan dalam pembangunan, baik secara fisik maupun mental di Papua.

Tujuan utama kebijakan pemerintah pusat adalah mengsejahterakan dan meredam tuntutan referendum dari masyarakat Papua. Namun, masyarakat Papua tidak antusias menyambut kebijakan pemerintah pusat itu. Hal ini karena setiap kebijakan lahir dari inisiatif pemerintah pusat bukan inisiatif masyarakat setempat. Perspektif dari masyarakat Papua bahwa kebijakan itu hanya siasat semata untuk meredam perjuangan kemerdekaan bagi bangsa Papua dan mengolakan tujuan serta kepentingan mereka sendiri. Karena itu, perjuangan kemerdekaan bangsa Papua terus digemakan. Namun, dari perjuangan ini telah melahirkan konflik vertikal. Konflik vertikal masih terpekik di tanah Papua karena adanya perbedaan ideologi, nilai, pemahaman dan kepentingan yang amat mencolok.

Mengatasi perbedaan pandangan, pemahaman, ideologi dan kepentingan yang telah melahirkan konflik, etika diskursus Habermas hadir untuk mengatasi konflik vertikal tersebut. Menurut Habermas setiap perbedaan harus didiskusikan secara rasional dan argumentatif agar mencapai saling pengertian dan pemahaman timbal balik. Hemat penulis, komunikasi yang rasional dan argumentatif adalah kunci utama untuk menguraikan konflik vertikal di Papua. Ketika komunikasi tidak mendapat posisi dalam konteks Papua, maka sejauh itu pula konflik vertikal akan terus terjadi. Karena itu, konflik vertikal itu harus dibendung dengan sarana dialog. Tujuan dialog adalah menjelaskan perbedaan pemahaman, dan kepentingan sehingga kedua kubu yang berkonflik bisa menghasilkan persetujuan atau konsensus rasional demi kemaslahatan bersama.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis ingin mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

### **5.2.1 Bagi Pemerintah**

Pemerintah perlu membuka kanal-kanal dialog yang lebih inklusif, dan melibatkan masyarakat Papua sebagai subjek, bukan hanya objek kebijakan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa forum-forum dialog berjalan dengan kesetaraan, transparansi dan tidak diskriminatif.

### **5.2.2 Bagi Masyarakat Papua**

Orang asli Papua perlu mengartikulasikan aspirasi dan identitas mereka secara konstruktif dalam ruang-ruang publik. Pendekatan yang berbasis pada diskursus memungkinkan perbedaan pandangan untuk didamaikan melalui argumen yang rasional tanpa tekanan dan diskriminasi dari pihak mana pun.

### **5.2.3 Bagi Pembuat Kebijakan dan Pemimpin Daerah**

Dalam pembuatan kebijakan tertentu, pemerintah harus menerapkan etika diskursus. Tujuan ini bermaksud agar kebijakan dihasilkan berangkat dari apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan yang telah disepekat bersama dalam diskursus.

### **5.2.4 Bagi Pihak yang Berkonflik**

Pihak yang berkonflik tentu mempunyai segudang ide, pemahaman, keinginan, kepentingan dan ideologi tertentu. Semuanya itu, harus didiskusikan secara jujur dan terbuka agar saling memahami satu sama lain. Ketika setiap kubu tidak ingin terbuka mendialogkan isi hatinya, maka sejauh itu juga konflik akan terus bergema. Karena itu, para aktor perlu membuka diri dan mau berdialog secara rasional supaya damai dan kesejahteraan dapat bertakhta di tengah kita.

## DAFTAR PUSTAKA

### KAMUS

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2008.

### BUKU-BUKU

-----, *Filsafat Pragmentaris*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.

-----, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992).

-----, *Kebenaran dan Para Kritikusnya: Mengulik Idea Besar yang Memandu Zaman Kita*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2023.

-----, *Kritik Ideologi Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.

-----, *Menuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2009.

-----, *Moral Politik Hukum*. Jakarta: Obor, 1999.

-----, *Teori Hukum Positif Dalam Perspektif Etika Diskursus Jürgen Habermas*. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2011.

A.B. Menoh, Gusti. *Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan Antara Agama dan Negara Dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2015.

Afiranshya, Anggi dkk. *Pendidikan Sebagai Jalan Terang*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

Baxter, Hug. *Habermas: The Discourse Theory of Law and Democracy*. Stanford: Stanford University press, 2011.

Bertens, K. *Sejarah Filsafat Barat Kontemporer Jerman dan Inggris*. Jilid 1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Budi Hardiman, F. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2000.

- Buergenthal, Thomas. *Internasional Human Rights*. St. Paul. Minn West Publishing Co., 1995.
- Choil, M. *Sejarah Operasi Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Departemen Pertahanan- Keamanan Pusat Sejarah Abri, 1979.
- Elisabeth, Adriana. *Mosaik Cenderawasih: Pembangunan dan Kesejahteraan di Tanah Papua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Erdayani, Rizki dkk. *Pengantar Teori Pembangunan*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Fanani Rosyadi, Ahmad. *Rasisme di Papua: Tinjauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Kasus Rasisme Surabaya*. Jakarta: Penerbit: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2021.
- Fatlolon, Costantinus. *Masalah Terorisme Global; Dalam Konteks Teori Habermas Tentang Kolonisasi Dunia Kehidupan Oleh Sistem Modern*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2016.
- Franky, Y. L. Franky dan Morgan, Servyn. *Atlas Kelapa Sawit di Papua di Bawa Kendali Penguasa Modal* (Jakarta: Penerbit Pustaka, 2015).
- Freedom Nanuru, Ricardo. *Gereja Sosial Menurut Konsep Rasionalitas Komunikatif Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.
- Gusti Madung, Otto. *Politik Antara Legalitas dan Moralitas*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- Habermas, Jürgen. *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*, trans, Thomas McCarthy, Boston: Beacon Press, 1984.
- Ibrahim. *Kolonisasi dan Cahaya Dekolonisasi di Papua Barat*. Jayapura: Penerbit Nentiens Focus, 2010.
- Karma, Filep Karma. *Seakan Kitorang Setengah Binatang*. Jayapura: Penerbit Deiyai, 2014.
- Magnis-Suseno, Franz. *12 Tokoh Etika Abad ke-20*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2000.
- Malak, Stepanus. *Otonomi Khusus Papua*. Jakarta: Ar Raafi, 2012.
- McGibbon, Rodd. *Pitfalls of Papua: Understanding the Conflict and its Place in Australia-Indonesia Relations*. New South Wales: Lowy Institute for International Policy, 2006.
- Muzaqqi, Fahrul. *Diskursus Demokrasi dan Deliberatif di Indonesia*. Jawa Timur: Airlangga University Press, 2019.

- Nalle, Victor Nalle. *Menggagas Hukum Berbasis Rasionalitas Komunikatif*. Malang: Brawijaya Press (UB Press), 2010.
- Nyoman Sudira, I dkk. *Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi Papua*. Jakarta: Imparsial, the Indonesia Human Rights Monitor, 2020.
- S. Yoman, Socrates. *Jejak Kekerasan Negara dan Militerisme di Tanah Papua*. Bali: Pustaka Larasan, 2021.
- Seran, Alexander. *Teori Dalam Perspektif Etika Diskursus Jürgen Habermas*. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya-Jakarta, 2011.
- Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional Teori Kritis Sekolah Frankfurt Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Skpc, *Nama Tanpa Pusara, Pusara Tanpa Nama: Laporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Biak, Irian Jaya*. Jayapura: Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELS-HAM) Irian Jaya, 1999.
- Supartiningsih, ddk. *Pemikiran Tokoh Filsafat Barat Kontemporer*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024.
- Tjahjono, Budi. *Hak Asasi Manusia Di Papua*. Jakarta, 2011.

## JURNAL

- Anugerah, Boy. "Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi". *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 7:4, Desember 2019.
- Avit Adriansyah, Mario dan Suyanto. "Evaluasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan dan Kesehatan (Studi pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo)". *BABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 11: 3, Agustus 2023.
- Budi Hardianb, F. Teori Diskursus dan Demokrasi. *dalam Diskursus*, 7:1, April 2004.
- Faruqi Tutukansa, Aldho dan Dwi Tuffahati, Enjang. "Optimalisasi Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan Provinsi Papua Sebagai Daerah 3T Di Indonesia". *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 14: 2, November 2022.
- Hamson, Zulkarnain. "Pemikiran Jürgen Habermas". *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 24:1, April 2022.
- Hidayat, Rahmat. "Transmigrasi Dan Proses Marginalisasi Ekonomi Orang-Orang Papua Di Tanah Papua". *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 2:1 Januari 2024.

- Magnis Suseno, Franz. "75 Tahun Jürgen Habermas". *Basis*, 11: 12, November 2004.
- Mustamin. "Studi Konflik Sosial di Desa Bugis dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014". *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 2:2, Oktober 2016.
- Pamungkas, Cahyo dkk. "Makna Pembangunan Bagi Orang Asli Papua: Studi Terhadap Marginalisasi dan Depopulasi di Tanah Papua". *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 7:6, Juli 2022.
- Prasojo, Pandu. "Memahami Pola Resolusi Konflik Kepentingan di Indonesia". *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 3:3, Agustus 2024.
- Rayinda Sephira Putri, "Peningkatan Dana Anggaran Terhadap Ketimpangan Pendidikan (Studi Kasus: Provinsi Papua)". *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 3: 2, Mei 2020.
- Rio Adiwijaya, Domini Rio. "Perbandingan Antara Etika Jürgen Habermas dan Richard Rorty Sebagai Prinsip Dasar Bertindak Manusia". *Jurnal Humaniora*, 1: 2, Oktober 2010.
- Shohudin, Umar. "Membedah Teori Kritis Mazhab Frankfurt: Sejarah, Asumsi, dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Teori Ilmu Sosial". *Journal of Urban Sociology*, 3: 2, Oktober 2020.
- Sholihah, Amilatu. "Teori Kritis Dalam Paradigmaa Komunikasi Jürgen Habermas". *Jurnal Filsafat Agama dan Pemikiran Islam*, 15: 3, Agustus 2018.
- Srie Gunawan, Leo Agung. "Diskursus Agama Dalam Ruang Publik Menurut Jürgen Habermas". *Jurnal Filsafat-Teologi* 16: 2, Juni 2019).

## SKRIPSI

- Annisa Madani, Adinda. "Penyelesaian Konflik Bersenjata DI Papua Barat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional". Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2018.
- Korwa, Rycho Korwa, "Proses Integrasi Irian Barat Ke Dalam NKRI". Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado, 2022.
- Migu Sore, Mikael. "Etika Diskursus JÜrgen Habermas". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2016.
- Rivandi Wangkut, Elrikus. "Etika Diskurus Jürgen Habermas Dan Konflik Normatif di Indonesia". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021.

Yulastika Dewi, Naimah. "One Dimensional Man; Studi Terhadap Kritik Herber Marcuse Mengenai Masyarakat Modern". Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri, 2013.

## INTERNET

AI Fiqtri, Achmad. "Kronologi KKB Serang 10 Guru dan Nakes hingga Bakar Rumah Dinas di Yahukimo". *DetikNews* 25 Maret 2025. <https://papua.inews.id/berita/kronologi-kkb-serang-10-guru-dan-nakes-hingga-bakar-rumah-dinas-di-yahukimo>, diakses pada 25 Maret 2025.

Ardito Ramadhan, "BRIN Ungkap Masalah Pendidikan di Papua Barat: Ketidakhadiran Guru hingga Akses Terbatas". *Kompas* 4 Januari 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/04/18304661/brin-ungkap-masalah-pendidikan-di-papua-barat-ketidakhadiran-guru-hingga>, diakses pada 2 Februari 2025.

Aswara, Dani. "Konflik di Papua, Masyarakat Sipil jadi Korban Terbanyak Pada Tahun 2024". *Tempo* 2 Januari 2025. <https://www.tempo.co> diakses pada 25 Maret 2025

Baru, Maria. "Kado Natal Terburuk Untuk Orang Papua: Ratusan Warga Pengunungan Bintang Mengungsi Usai Pengerahan Militer". *KASKUS* 13 Desember 2024. <https://www.bbc.com> diakses pada 25 Maret 2025

Deny, Septian. "Ternyata Ini Alasan Proyek 1 Juta Hektare Sawah Dibangun di Merauke". *Liputan6* 13 September 2024. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5701083/ternyata-ini-alasan-proyek-1-juta-hektare-sawah-dibangun-di-merauke?page=3>, diakses pada 18 Januari 2025

Franky, "Masalah dari Food Estate dan Lahan Tebu di Merauke dalam Top 3 Tekno". *Tempo* 22 September 2024. <https://www.tempo.co/lingkungan/masalah-dari-food-estate-dan-lahan-tebu-di-merauke-dalam-top-3-tekno--7085>, diakses pada 18 Januari 2025

Jauhary, Andi, "Dinkes: Berganti pasangan faktor penular HIV-AIDS terbanyak di Papua" *antaranews*. *Com*. <https://www.antaranews.com/berita/3724530/dinkes-berganti-pasangan-faktor-penular-hiv-aids-terbanyak-di-papua>, diakses 29 Mei 2025.

Paper, Briefing, "Catatan Kondisi Hak Asasi Manusia di Papua" <https://123dok.com/document/qm0k2j4y-catatan-pelanggaran-ham-di-papua.html>, diakses 29, Mei 2025.

Rahima Sari, Amelia. "Sederet Alasan TPNPB OPM Serang Pendulang Emas". *Tempo Com*. <https://www.tempo.co/politik/sederet-alasan-tpnpb-opm-serang-pendulang-emas-1230373>, diakses pada 12 April 2025.

- Rudi, “TNI AD Kirim 450 Prajurit Jaga Perbatasan Papua”. *Indonesiadeferense* 15 Februari 2025. <https://indonesiadeferense.com/tni-ad-kirim-450-prajurit-jaga-perbatasan-papua/> diakses pada 25 Maret 2025
- Salinan Peraturan Presiden Republik Indonesia. *BPK RI* 26 Januari 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/251973/perpres-no-40-tahun-2023>, diakses pada 19 Januari 2025
- Simson, Brien. *Indonesia’ 1969 Takeover of West Papua not by “Free Choise” document release marks 35<sup>th</sup> anniversary of controversial vote and annexation secret files show U.S. support for Indonesia, human rights abuses by Indonesia Military*. [http// www.freewestpapua.org](http://www.freewestpapua.org). lihat dokumen rahasia negara federal Australia. Diakses pada 21 Januari 2025.
- Wulandari, Trisna. “Makna Pembukaan UUD 1945 Alinea 1-4, Begini Kandungan Tiap Alinea”. *Detikcom* 10 Novermber 2021. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5804954/makna-pembukaan-uud-1945-alinea-1-4-begini-kandungan-tiap-alinea>, diakses pada 23 Januari 2025.
- Yeimo, Henky, “Aksi pembakaran perburuk kondisi layanan publik di Sinak”. *Jubi Papua* 19 Januari 2025. <https://jubi.id/polhukam/2025/aksi-pembakaran-perburuk-kondisi-layanan-publik-di-sinak/> diakses pada 25 Maret 2025.